

## Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2020)

Suci Novalia<sup>1\*</sup>, Deviani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [sucinovalia4@gmail.com](mailto:sucinovalia4@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

8 Agustus 2022

**Tanggal Revisi:**

30 Oktober 2022

**Tanggal Diterima:**

17 November 2022

---

**Keywords:** *Transparency; Democracy; Political Ideology; Local Government Size.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Suci, Novalia & Deviani. (2023). Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2020). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 127-140.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.636>

---

**Abstract**

*This study aims to analyze the influence of democracy, analyze the influence of political power and analyze the influence of local government measures on the financial transparency of regency/city governments in Jambi Province. The population in this study was the Regency/City Regional Government in Jambi Province with a total sample of 44 samples during 4 years of observation (2017-2020). The data analysis technique used in this study is panel data regression analysis. The result of this study is that democracy and size of local governments has a significant effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province. Political ideology has no effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province. The high and low number of parties winning legislative elections has no effect on the transparency of local governments. Political ideology does not affect the degree of disclosure of information and transparency. The second hypothesis which states that political power does not have a significant effect on the transparency of local governments in districts/cities throughout Jambi Province is not accepted.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi publik sebagai langkah awal memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi merupakan prinsip terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk mengetahui informasi pengelolaan sumber daya secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemerintah. Diterbitkan aturan ini memudahkan untuk mendapatkan informasi keuangan secara terbuka dari pemerintahan dan mengurangi konflik antara pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan.

Selain itu salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah dengan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah wajib untuk mempublikasikan informasi publik pada setiap kegiatan yang dilakukan. Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini adalah Komisi Informasi. Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* agar mudah di akses oleh publik di atur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diterbitkannya aturan ini informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bisa diakses kapan saja secara online pada *website* resmi masing-masing daerah.

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan transparansi semakin gencar, hal ini dapat diketahui dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 yang ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk mendukung aksi pencegahan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berdampak pada pemborosan. Diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pemerintahan yang transparan kepada publik atau pihak-pihak yang berkaitan.

Transparansi memiliki peran penting untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik. Berdasarkan penelitian Lestari & Rahardjo (2020) menyatakan transparansi memiliki peran penting di pemerintah daerah, dengan melakukan transparansi warga negara ikut bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adiputra *et.,al* (2018) mengungkapkan pemerintah daerah yang menyampaikan informasi keuangan kepada publik mampu mewujudkan transparansi di pemerintah Indonesia.

Pada prinsipnya transparansi informasi keuangan merupakan salah satu parameter utama yang difokuskan pemerintah untuk mencegah tidak pidana korupsi agar dapat mencapai pemerintah yang baik (*good governance*). Dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (2021) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 116 aduan dan 2020 sebanyak 54 aduan selama rentang tahun 2019-2020.

Nulailah & Syamsul (2021) menyatakan bahwa Provinsi Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan tingkat transparansi cukup rendah pada aspek pengelolaan anggaran daerah dengan rata-rata skor 28,33%. Berdasarkan penelitian Ritonga & Syamsul (2016) mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk aspek perencanaan dengan skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke dalam dua puluh enam Pemprov urutan terbawah untuk aspek pelaksanaan yakni dengan skor 1 (11,11%), dan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah dengan skor 1 (10%). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemprov Jambi mengabaikan pentingnya transparansi dan tertutup dalam mewujudkan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah diberikan tanggungjawab dalam membuat informasi yang akurat dan relevan sehingga memberikan akses kemudahan untuk masyarakat. Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dan agen. Teori agensi dalam pemerintahan ialah bahwa

pemerintah daerah bertindak sebagai agen, dan masyarakat bertindak sebagai prinsipal. Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan yang timbul saat satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan adanya teori agensi ini, maka masyarakat sebagai principal harus terlibat dalam mengawasi kegiatan pemerintah daerah (agen).

Demokrasi sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan dalam keterbukaan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan. Kebebasan dan kemudahan akses informasi oleh publik mengenai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah merupakan keberhasilan implementasi sistem demokrasi (Hollyer *et al.*, 2011). Kemajuan demokrasi di Indonesia berkembang pesat ditandai dengan adanya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintah. Berdasarkan hasil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (bakesbangpol) Provinsi Jambi dalam melaksanakan Rakor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2021 menyatakan bahwa Indeks demokrasi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2018 pada angka 68,71%, lalu pada 2019 dengan angka 69,76% serta pada tahun 2020 dengan angka 75,53%. Selama 3 tahun Provinsi Jambi selalu mengalami peningkatan dalam pencapaian IDI yaitu pada kategori sedang (indeks 60%-80%), maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh demokrasi terhadap transparansi keuangan di pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Pada penelitian Hollyer *et al* (2011) menyatakan bahwa sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi masyarakat berhak mengakses keterbukaan informasi pemerintah yang merupakan bentuk hak asasi manusia. Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa transparansi tidak dapat dipisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Krah & Mertens (2020) melakukan penelitian terhadap demokrasi dan transparansi di pemerintah daerah, penelitian ini berkontribusi pada sektor publik yaitu menghubungkan antara demokrasi dan transparansi di pemerintah daerah. Hasil penelitian Krah & Mertens (2020) menyatakan bahwa adanya kebutuhan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan demokrasi yang bertujuan memastikan pengungkapan laporan keuangan kepada masyarakat demi meningkatkan kepercayaan dan mengurangi resiko korupsi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa demokrasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat transparansi pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi memberikan ruang yang sebebaskan-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan aspirasinya seperti mengetahui kinerja pemerintah.

Muhtar *et al* (2011) menuliskan ideologi berarti teori, cara berpikir atau paham yang menjadi satu kesatuan program sosial politik. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multi partai, tidak ada partai yang memiliki suara terbanyak sehingga terbentuklah koalisi dan oposisi. Apabila partai pendukung kepala daerah semakin besar maka terjadinya peningkatan perhatian masyarakat terhadap kinerja mereka. Maka timbulnya tuntutan tersebut menyebabkan masyarakat memerlukan informasi yang akhirnya memicu tingkat keterbukaan informasi yang lebih tinggi.

Transparansi pemerintah daerah telah menjadi fokus beberapa penelitian terdahulu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pada penelitian Araujo dan Tejed-Romero (2016) menyatakan bahwa kekuatan politik, jumlah pemilih, dan kompetisi politik berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Muhtar *et al* (2017) menyatakan bahwa kekuatan politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Sutaryo & Tri Amanu (2020) yang menyatakan bahwa kekuatan politik tidak mempengaruhi transparansi informasi

pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian yang belum konsisten, mendasari peneliti untuk melanjutkan penelitian kembali mengenai pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi keuangan di pemerintahan daerah.

Krah & Mertens (2020) mengungkapkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi karena 2 dua alasan. Yaitu dikarenakan pemerintah daerah yang besar memiliki banyak tekanan dari publik untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki masyarakat yang berpengetahuan tinggi sehingga menuntut banyak informasi dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan. Pada penelitian yang dilakukan Aulia & Rahmawaty (2020) dan Masdiantini & Erawati (2016) menyatakan ukuran pemerintah daerah dapat diwakilkan dengan menggunakan total aset (aktiva) pemerintah daerah.

Pada penelitian Nosihana & Yaya (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah ditandai dengan besarnya aset yang dimiliki suatu daerah. Aset tersebut dapat mewakili besarnya pemerintahan dan banyaknya modal yang harus ditanam. Berdasarkan hasil yang penelitian yang dilakukan Adiputra *et al* (2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset kepemilikan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Sari & Mustanda (2019) mengungkapkan ukuran pemerintah daerah tidak memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belum konsistennya penelitian diatas peneliti merasa perlu melanjutkan penelitian kembali ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Krah & Mertens (2020) yang meneliti demokrasi dan transparansi keuangan di pemerintah daerah Sub-Sahara Afrika tepatnya di Ghana. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa demokrasi, kekuatan politik dan ukuran pemerintah mempengaruhi tingkat transparansi pemerintahan daerah di Sub-Sahara Afrika dan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Oleh karena itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama di Indonesia tepatnya Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Penelitian ini melanjutkan riset sebelumnya (Rizky Zikri Sandunaez, 2022) yang mengukur terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2020 berdasarkan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rizki Zikri Sandunaez (2022) maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2020 dengan menggunakan variabel demokrasi, kekuatan politik dan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel Independen.

## **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan prinsipal dengan agen. Jensen & Meekling (1976) menyatakan bahwa teori agensi yaitu hubungan yang timbul berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu prinsipal memberikan kewenangan atau mandat serta tanggung jawab kepada agen untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal, sedangkan pihak agen yaitu menerima kewenangan serta bertanggung jawab kepada pihak prinsipal. Menurut Banker & Paxton (1987) dalam Wau & Ratmono (2015) menyatakan pemerintah daerah selaku agen mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan yang berkaitan dengan

penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan masyarakat kedalam bentuk laporan keuangan. Schilemans (2013) dalam Krah & Mertens (2020) teori keagenan dapat memprediksi kemungkinan adanya masalah keagenan yang dapat merusak hasil hubungan.

### **Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Urusan pemerintahan daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu, keuangan, pelayanan umum, SDA (Sumber Daya Alam), dan sumber daya lainnya. Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini terjadi sejak kemerdekaan sampai era reformasi demokrasi mengalami perubahan. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945 yang mengatur kedaulatan rakyat. Hal ini secara tegas bahwa UUD 1945 mendasar pada pemerintahan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

### **Transparansi**

Definisi transparansi terdapat dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP71/2010) yang berbunyi batasan transparansi sebagai berikut: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan”. Dengan adanya keterbukaan dalam melakukan penyelenggaraan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintah.

### **Demokrasi**

Demokrasi” terdiri dari dua kata yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dalam penelitian ini demokrasi dikaji dari perspektif politik, demokrasi adalah sistem politik dimana lembaga pemerintahan seperti eksekutif dan legislative diisi melalui proses pemilihan umum (pemilu). Demokrasi menyebabkan hubungan antara negara dan rakyat memiliki kedudukan yang sejajar sebagai subyek. Era demokrasi menyebabkan perubahan yang cukup besar terutama dalam kaitannya hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai representasi dari negara. Dalam negara demokrasi, hukum administrasi negara menjadi alat bagi pejabat pemerintahan untuk mewujudkan negara kesejahteraan tidak menempatkan hukum sebagai sarana bagi kekuasaan dan kewenangan, tetapi menjadi sarana atau alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **Kekuatan Politik**

Miriam Budiardjo (1988: 52) dikutip dari P. Anthonius Sitepu (2014) mengatakan yang di maksud dengan kekuatan politik adalah ”masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan kekuatan politik bisa berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.”

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pada suatu entitas adalah skala entitas yang dapat dikelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya dengan beberapa cara tolak ukur. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besarnya suatu organisasi tersebut. Menurut Sumardjo (2010) dan Lesmana (2010)

dalam menggunakan total aset pemerintah sebagai proksi untuk variabel ukuran pemerintah daerah dikarenakan aset tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. Ukuran Pemerintah dilihat dari jumlah aset dalam neraca pemerintah daerah tersebut. Kabupaten maupun kota dengan memiliki total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Menurut Rahman dkk. (2013) menyatakan besar total aset mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan sebagai bukti telah melakukan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kausal. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan pada populasi atau sampel tertentu, data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data, bersifat statistik yang mana tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2018).

### **Jenis dan Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data menggunakan data sekunder. sumber didapatkan dari website, buku, literatur, dan artikel yang terdapat di internet. Menurut Sugiyono (2018:137), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau pihak yang memberi data tidak berhubungan langsung dengan pengumpulan data atau bisa disebut berasal dari pihak lain.

### **Populasi dan Sampel**

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan sampel penelitian sebanyak 11 populasi dalam satu tahun. Menurut Nanang Martono (2011:74) populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:174).

### **Metode Pengumpulan Data dan Variabel Penelitian**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, survei sekunder. Variabel penelitian ini adalah variable dependen dan variabel independen.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (*pool data*) sehingga regresinya disebut model regresi data, dengan rumus:

$$T_{it} = \alpha + \beta_1 Demo_{it} + \beta_2 Idepol_{it} + \beta_3 Size_{it} + e_{it}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Model Regresi Panel

#### *Chow Test* atau *Likelyhood Test*

*Chow Test* atau *Likelyhood Test* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam *Chow Test* adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan  $H_0$  adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik Chi-square, jika probabilitas dari *Chow Test* lebih kecil dari signifikansi (0,05) maka  $H_a$  diterima dan sebaliknya. Hasil analisis model dengan menggunakan *Chow Test* atau *Likelyhood Test* pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil *Chow Test* atau *Likelyhood Test***

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.690900	(10,30)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.494677		100.0000

*Sumber: Data olahan Eviews 10, 2022*

Berdasarkan tabel hasil *Chow Test* diatas dengan menggunakan *Eviews 10*, didapat probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  Untuk model ini diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect*, sehingga dilanjutkan ke *Hausman Test*.

#### *Hausman Test*

*Hausman Test* merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *model random effect* yang paling tepat digunakan. Jika nilai statistik hasil uji *Hausman Test* lebih kecil dari signifikansi (0,05) maka model yang tepat adalah *fixed effect* dan sebaliknya. Jika model *common effect* atau *fixed effect* yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, namun apabila model yang digunakan adalah *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hipotesis yang diajukan pada *Hausman Test* adalah sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Berdasarkan analisis model menggunakan *Hausman Test* diperoleh hasil pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Uji *Hausman Test***

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.753458	3	0.0000

*Sumber: Data olahan Eviews 10, 2022*

Berdasarkan tabel hasil *Hausman Test* di atas menggunakan Eviews 10, diperoleh probabilitas sebesar 0.0020, nilai probabilitas ini lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  untuk model ini ditolak dan  $H_a$  diterima. Model estimasi yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*, sehingga perlu melakukan uji asumsi klasik.

### **Analisis Regresi Panel**

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk data panel yaitu data yang terdiri dari gabungan data runtut waktu (*time series*) dan runtut tempat (*cross section*). Hasil penelitian ini dapat menentukan pengaruh *Economic Value Added* dan *Market Value Added* terhadap *Return Saham* berdasarkan estimasi regresi panel dengan pendekatan *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$TS = 199.9808 + 2.081305DM - 3.336530KP + 3.175062UP$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Konstanta ( $\alpha$ )**

Nilai konstanta sebesar 199.9808, ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel independen (bebas) yaitu demokrasi, ideologi politik dan ukuran pemerintah daerah akan bernilai 199.9808.

### **Koefisien regresi ( $\beta$ ) Demokrasi**

Koefisien demokrasi diperoleh sebesar 2.081305 hal ini menunjukkan jika variabel independensi demokrasi meningkatkan satu satuan maka variabel transparansi keuangan akan meningkatkan sebesar 2.081305 dengan asumsi variabel lain konstan.

### **Koefisien regresi ( $\beta$ ) Kekuatan Politik**

Koefisien kekuatan politik diperoleh sebesar -3.336530 hal ini menunjukkan jika variabel independensi kekuatan politik menurun satu satuan maka variabel transparansi keuangan akan menurun sebesar -3.336530 dengan asumsi variabel lain konstan.

### **Koefisien regresi ( $\beta$ ) Ukuran Pemerintah**

Koefisien ukuran pemerintah diperoleh sebesar 3.175062 hal ini menunjukkan jika variabel independensi ukuran pemerintah meningkat satu satuan maka variabel transparansi keuangan akan meningkat sebesar 3.175062 dengan asumsi variabel lain konstan.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji ini digunakan untuk menguji *Goodness-fit* dari model regresi yaitu seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari nilai independen yang dapat dilihat dari *adjusted R<sup>2</sup>*. Hasil estimasi diketahui bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh sebesar 0.793976. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 79,3% dan sebesar 20,7 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

### **Uji F (Simultan)**

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah model yang digunakan dapat memberikan pengaruh signifikan atau tidak yang dapat dilihat dari probabilitas (*F-statistic*). Jika *F-statistic* lebih besar dari nilai kritis artinya variabel independen dalam model persamaan tersebut secara

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Nilai probabilitas (*F-statistic*)  $< 0,05 = 0.000$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model persamaan tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### Uji Hipotesis (*t-Test*)

Uji *t* digunakan untuk menguji secara individu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, apakah model yang digunakan dapat memberikan pengaruh signifikan atau tidak. Uji *t* dilakukan dengan membandingkan antara nilai *t* yang dihasilkan pada perhitungan statistik dengan nilai *t*<sub>tabel</sub>. Untuk mengetahui nilai *t*<sub>hitung</sub> dapat dilihat melalui tabel hasil uji regresi data panel.

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah demokrasi berpengaruh terhadap transparansi keuangan, diketahui bahwa koefisien  $\beta$  demokrasi sebesar 2.081305 nilai *t*<sub>hitung</sub> 3.244215 dan nilai signifikansi  $0.0024 < 0,05$ . Hal ini berarti demokrasi berpengaruh terhadap transparansi keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kekuatan Politik tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan, diketahui bahwa koefisien  $\beta$  demokrasi sebesar -3.336530 nilai *t*<sub>hitung</sub> -1.264276 dan nilai signifikansi  $0.2159 > 0,05$ . Hal ini berarti Kekuatan Politik tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak
- c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi keuangan, diketahui bahwa koefisien  $\beta$  ukuran pemerintah sebesar 3.175062 nilai *t*<sub>hitung</sub> 3.327993 dan nilai signifikansi  $0.0052 < 0,05$ . Hal ini berarti ukuran pemerintah berpengaruh terhadap transparansi keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H3) diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Demokrasi terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah Kab/kota di Provinsi Jambi. Lamanya durasi yang ditempuh pada pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi maka berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan bahwa transparansi dapat dipandang sebagai elemen demokrasi dan rezim demokrasi bisa dikatakan transparan. Berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara demokrasi terhadap transparansi. Transparansi keuangan yang tinggi di kalangan pemerintah daerah sehingga bisa menghindari masalah asimetris informasi, masalah keagenan, di penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Krah & Mertens (2020) yang mengatakan bahwa secara umum, transparansi diakui sebagai prinsip demokrasi. Semakin lama durasi yang ditempuh dalam pengukuran demokrasi dapat menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap transparansi. Fung (2013) menganggap empat prinsip transparansi demokratis. Pertama, informasi tentang operasi dan tindakan organisasi seperti pemerintah, yang menarik untuk rakyat harus dibuat untuk umum. Kedua, tersedia informasi harus sejalan dengan sejauh mana operasi dan kegiatan organisasi yang membahayakan kepentingan masyarakat. Ketiga, informasi harus diatur dan disediakan dengan cara yang dapat diakses oleh kelompok pengguna yang ditargetkan. Keempat, sosial, politik, dan lingkungan ekonomi masyarakat harus diatur dengan cara yang memungkinkan individu dan

kelompok untuk mengambil tindakan berdasarkan informasi yang diungkapkan. Dengan demikian, demokrasi masyarakat memiliki hak yang berdaulat untuk mengetahui apa yang terjadi di pemerintahan, termasuk masalah keuangan.

Kebutuhan untuk transparansi di antara masyarakat adalah penting karena merupakan dasar bagi demokrasi tata kelola, pada pemerintahan yang demokratis, informasi keuangan mengenai keuangan yang dikumpulkan, dibelanjakan dan yang diinvestasikan diungkapkan kepada publik untuk memungkinkan warganya membuat penilaian akuntansi keuangan (Adiputra *et al.*, 2018).

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency theory*. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen demokrasi, kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*), tidak transparan, *moral hazard*, dan *adverse selection*.

### **Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan Politik tidak berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Artinya hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya Kekuatan Politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Hal ini mengungkapkan bahwa kekuatan politik tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dan transparansi. Besar atau kecilnya partai pemenang pemilu pada Kabupaten/Kota, tidak berpengaruh pada perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Krah & Mertens (2020) dan Muhtar *et al.*, (2017) yang menemukan hasil bahwa kekuatan politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Krah & Mertens (2020) dan Muhtar *et al.*, (2017) menyebutkan bahwa partai pemenang pemilu legislatif yang didukung oleh tim koalisi pemerintah pusat lebih transparan karena memperoleh tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan informasi yang lebih baik.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Araujo & Tejedo-Romero (2016) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kekuatan politik terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Untuk Indonesia yang menganut sistem multi partai, tidak ada partai yang mempunyai suara mayoritas. Dengan demikian koalisi dan oposisi menjadi suatu keharusan. Semakin besar partai pemenang pemilu legislatif, semakin tinggi perhatian masyarakat terhadap kinerja mereka. Karena tuntutan yang tinggi tersebut, masyarakat akan membutuhkan informasi sehingga mendorong keterbukaan informasi yang lebih besar.

Pengklasifikasian partai di Indonesia masih kurang jelas karena Indonesia menganut sistem multi partai dengan setiap partai mempunyai desain yang berbeda dalam hal transparansi (Sutaryo dan Tri Amanu, 2020). Pembagian kekuatan politik berdasarkan partai pemenang pemilu pusat bisa saja tidak sejalan dengan partai yang mendominasi DPRD masing-masing daerah. Partai koalisi pemerintah pusat belum tentu di daerah yang lain partai tersebut merupakan partai dominan (partai pemenang). Pada akhirnya yang mengawasi dan menjalankan pemerintahan adalah lembaga legislative masing-masing daerah sehingga transparansi pemerintah daerah tidak di pengaruh oleh kekuatan politik.

Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency theory*. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan). Menurut Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern yang memiliki kekuatan politik didasarkan pada serangkaian hubungan *prinsipal-agen*. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula aset yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga mendorong meningkatnya transparansi pemerintah daerah Kab/Kota se-Provinsi Jambi karena masyarakat akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan logaritma natural dari seluruh total aset pemerintah daerah menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki total aset lebih besar dari pada Kab/Kota lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi pemerintahannya kepada publik secara transparan sebagaimana dijelaskan dalam instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Nosihana & Yaya (2016) dan Kraih & Mertens (2020) yang memperoleh hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Menurut Kraih & Mertens (2020) ukuran pemerintah daerah ditemukan memiliki hubungan yang positif terhadap transparansi karena dua alasan. Pertama, pemerintah daerah yang besar memiliki lebih banyak tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang dikelola oleh pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dan tuntutan dari masyarakat sehingga mendorong pemerintahan untuk menjadi lebih transparan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Adiputra et.,al (2018) dan Wau & Ratmono (2015) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi. Adiputra et.,al (2018) menyatakan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk terwujudnya transparansi keuangan dan non keuangan di pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena aset yang dimiliki digunakan untuk tujuan lain selain untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi bagi daerah yang seharusnya sangat berguna bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi pemerintah daerah secara *online*.

Teori agensi dapat mendasari penelitian ini, dimana teori agensi menyatakan bahwa pemerintah (agen) dituntut untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan kehendak masyarakat (prinsipal) selaku pemberi wewenang. Ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki pengelolaan yang lebih kompleks, sehingga akan muncul banyaknya asimetri informasi. Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut, maka pemerintah perlu melaporkannya kepada masyarakat. Penyediaan informasi keuangan yang dapat diakses tentang pemerintah daerah merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak berhak untuk menentukan jumlah dan jenis informasi apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi diperlukan sebagai pemenuhan hak masyarakat dan bukan hak istimewa dalam kerangka *principal-agen*.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN**

### **Simpulan**

1. Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Lamanya durasi yang ditempuh demokrasi pada pemerintah daerah Jambi maka berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Jambi. Hal ini menggambarkan bahwa transparansi dapat dipandang sebagai elemen demokrasi dan rezim demokrasi bisa dikatakan transparan. Sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan transparansi pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Kab/Kota se-Provinsi Jambi diterima.
2. Kekuatan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya partai pemenang pemilu legislatif tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Hal ini mengungkapkan bahwa ideologi politik tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dan transparansi. Sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan ideologi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Kab/Kota se-Provinsi Jambi tidak diterima.
3. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka transparansi pemerintah daerah juga semakin meningkat. Sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Kab/Kota se-Provinsi Jambi diterima.

### **Keterbatasan**

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 dan hanya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2020, sehingga objek pengamatan kurang luas.
2. Transparansi Informasi Keuangan dilihat dari *website* resmi pemerintah daerah, beberapa *website* pemda tidak mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen sehingga menyulitkan peneliti dalam menilai salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian yaitu ketepatan waktu
3. Transparansi Informasi Keuangan dilihat dari *website* resmi pemerintah daerah, beberapa *website* pemda telah menyediakan menu dan submenu konten transparansi anggaran, namun didalamnya hanya terdapat beberapa dokumen saja bahkan ada yang tidak sama sekali dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupload.

### **Saran**

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sama sekali mempublikasikan dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah hendaknya untuk segera mempublikasikan seluruh dokumen-dokumen tersebut secara lengkap ke dalam *websitenya* masing-masing, atau minimal 12 dokumen/indikator yang ditetapkan dalam Inpres No.7 Tahun 2015 karena inpres tersebut merupakan syarat minimal transparansi. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut diharapkan tidak hanya dipublikasikan dalam satu waktu tapi juga konsisten setiap tahun atau per periode anggaran.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian sehingga dapat lebih meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam beberapa tahun.

4. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel-variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, leverage, status pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, I. B., Lawal, W. A., & Etudaiye-Muhtar, O. F. (2011). The effects of firm size on risk and return in the Nigerian Stock Market: A sectoral analysis. *British Journal of Economics*, 1(2), 1-10.
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Araujo dan Tejedo-Romero. (2016). Local government transparency index : determinants of municipalities ' rankings Article information : About Emerald [www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com). *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 1–20.
- Arikunto. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aswar, K., Fanany, A. Y., Sumardjo, M., Wiguna, M., & Hariyani, E. (2022). Determinant Factors On The Disclosure Level Of Local Government's Financial Statements In Indonesia.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339-352.
- Firdaus, S. (2007). Pemikiran Politik Barat: Sejarah Filsafat Ideologi, dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3. cetakan ke 3. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2011). Democracy and transparency. *Journal of Politics*, 73(4), 1191–1205. <https://doi.org/10.1017/S0022381611000880>
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-meckling-76.pdf>.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(56), 1–13
- Mahmudi, (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150-1182.
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.

- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 180–195. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol20.Iss2.Art4>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i1.4619>
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta; Jalasutra.
- Wau, I., & Ratmono, D. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).